

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti sampaikan pada bagian pembahasan peneliti menarik kesimpulan bahwa DPC Partai Gerindra Kota Padang masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah partai yang terlembaga berdasarkan pada keempat aspek pelebagaan menurut Randall dan Svasand. Partai Gerindra Kota Padang pada dasarnya memiliki kekurangan pada masing-masing aspek pelebagaan tersebut, akan tetapi secara umum peneliti melihat bahwa faktor belum terlembaganya Partai Gerindra Kota Padang paling menonjol yakni terdapat pada aspek kesisteman dan juga pada aspek otonomi kebijakan. Gerindra Kota Padang dikatakan belum terlembaga karena masih kuatnya intervensi pusat sehingga partai belum mandiri dalam menetapkan kebijakan mereka sendiri terlebih lagi yang berkedudukan di tingkat daerah.

Partai yang terlembaga menurut Randall dan Svasand seharusnya adalah partai politik yang menjalankan roda organisasinya sesuai dengan konstitusi partai yang berlaku (AD/ART) serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Selain itu pada partai Gerindra peran seorang tokoh sentral juga masih sangat kuat yakni Prabowo dalam menentukan garis haluan partai. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yakni identitas nilai dan reifikasi sudah lebih banyak indikator pelebagaan yang telah terpenuhi oleh Partai Gerindra Kota Padang, walaupun

masih ada beberapa kekurangan pada masing-masingnya. Berikut kesimpulan peneliti untuk masing-masing aspek pelebagaan menurut Randall dan Svasand:

1. Kesisteman Organisasi (*Systemness*)

Pada bagian aspek kesisteman organisasi ini terdapat hal-hal yang sudah sesuai dengan indikator terlembaganya sebuah partai politik dan ada pula hal-hal yang masih belum tercapai oleh Partai Gerindra Kota Padang menurut aspek tersebut. Indikator-indikator yang hampir tercapai ini adalah yang pertama dari segi manajemen SDM termasuk di dalamnya proses rekrutmen anggota serta proses seleksi bakal calon legislatif yang sudah terlaksana sesuai dengan panduan AD/ART. Kemudian untuk kejelasan sumber keuangan Partai Gerindra Kota Padang juga telah transparan diungkapkan, lalu yang terakhir partai ini juga telah memiliki sistem manajemen konflik yang di dasarkan atas nilai-nilai demokrasi serta adanya mahkamah partai yang bertugas menangani konflik.

Lalu hal-hal yang menurut analisis peneliti belum sejalan dengan indikator-indikator pelebagaan partai adalah terletak pada bagian kepemimpinan partai di daerah yang masih lemah, hal ini dikarenakan ketergantungan partai terhadap putusan pusat yang sifatnya mengikat, sehingga peneliti mengatakan bahwa Partai Gerindra sebagai “partai komando”. Kuatnya intervensi pusat juga melemahkan kepemimpinan partai karena pemimpin partai sepenuhnya mengikuti keputusan-keputusan pusat terkait proses pengelolaan partai terkhusus lagi bagi Partai Gerindra Kota Padang yang berkedudukan di daerah, keadaan ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi belum diterapkan dalam tubuh partai.

2. Identitas Nilai (*Value Infusion*)

Pada bagian identitas nilai untuk indikator basis pendukung yang spesifik dan juga proses kaderisasi dalam partai Gerindra Kota Padang telah hampir memenuhi indikator ini. Untuk basis pendukungnya sendiri Partai Gerindra dalam pergerakannya sehari-hari memiliki interaksi yang kuat dengan kelompok pedagang khususnya Pedagang Pasar rasa sehingga kelompok ini menjadi salah satu basis pendukung utama Gerindra di Kota Padang. Sedangkan untuk proses internalisasi nilai-nilai kepartaian kepada anggotanya sendiri Partai Gerindra Kota Padang juga telah memiliki sistem kaderisasi yang bersifat kontinue/berkelanjutan baik itu di tingkat daerah (dalam hal ini DPC dan DPD) maupun di tingkat pusat.

Sedangkan untuk indikator yang belum tercapai oleh Gerindra Kota Padang pada aspek identitas nilai ini adalah masih besarnya peluang untuk terjadinya klientalisme dalam internal partai, serta loyalitas anggota partai masih belum kuat sebab balik lagi bahwa partai ini adalah partai komando yang bergantung pada ketetapan pusat. Sehingga loby-loby politik untuk kepentingan pribadi masih mungkin terjadi, dan yang terakhir adalah masih besarnya pemanfaatan simbol-simbol ketokohan dalam rangka penetrasi di tengah masyarakat, sehingga menjadikan Gerindra memiliki ketergantungan pada seorang tokoh sentral seperti Prabowo Subianto.

3. Otonomi Kebijakan (*Decisional Autonomy*)

Pada bagian otonomi kebijakan ini peneliti melihat masih banyak indikator-indikator yang belum terpenuhi oleh Partai Gerindra Kota Padang. Hal

ini dikarenakan dampak dari sistem komando yang berjalan dalam tubuh Partai Gerindra sehingga akhirnya juga berbuntut bagi partai-partai yang berkedudukan di daerah. Dampak-dampak dari sistem komando ini terlihat dari ketergantungan partai terhadap putusan pusat sehingga partai di daerah tidak mandiri dalam menjalankan organisasinya, sedangkan Randall dan Svasand menekankan bahwa partai harus mandiri dan terbebas dari oligarki elite dalam menjalankan organisasi mereka. Hal ini meliputi pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan internal yang seharusnya menjadi hak struktural Partai Gerindra Kota Padang itu sendiri. Sekalipun pada aspek otonomi kebijakan ini Partai Gerindra Kota Padang memiliki banyak kekurangan tetapi ada indikator yang juga hampir terpenuhi, yaitu hubungan yang di jalin partai dengan aktor luar tidak serta merta mempengaruhi keputusan internal partai, disini terlihat bahwa Partai Gerindra Kota Padang berusaha menjadi sebuah organisasi yang independen.

4. Reifikasi (*Reification*)

Sedangkan pada aspek reifikasi Partai Gerindra Kota Padang telah memiliki berbagai kegiatan dalam rangka memposisikan dan membranding dirinya sebagai organisasi yang bernilai positif di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan keaktifan Partai Gerindra Kota Padang untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan dan juga menjalankan fungsinya sebagai penghimpun aspirasi masyarakat seperti yang telah peneliti jelaskan secara rinci pada BAB V. Akan tetapi di sini Partai Gerindra juga masih minus dalam hal implementasi platform partai, dimana Gerindra Kota Padang masih membranding dirinya dengan simbol-simbol ketokohan Prabowo Subianto sebagai nilai jual utama. Dalam aspek

kesisteman dikatakan bahwa partai yang memiliki ketergantungan kepada aktor tertentu atau biasa disebut dengan partai personalistik memiliki tingkat pelebagaan yang lemah.

Berdasarkan deskripsi dari masing-masing indikator pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand di atas maka peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat pelebagaan yang dimiliki Gerindra Kota Padang bukanlah faktor dibalik kemenangan Gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019. Akan tetapi dalam konteks Partai Gerindra Kota Padang saat pemilihan legislatif tahun 2019 ketokohan Prabowo yang sangat melekat dengan Partai Gerindra menjadi sebuah keuntungan kompetitif bagi caleg-caleg yang berasal dari Partai Gerindra. Keuntungan ini muncul seiring popularitas seorang Prabowo Subianto yang disukai masyarakat Sumatera Barat termasuk Kota Padang, pada saat itu ia juga mencalonkan sebagai calon presiden yang diusung Partai Gerindra dan beberapa partai lainnya. Ketokohan serta besarnya dominasi Prabowo dalam Partai Gerindra dan popularitasnya di Sumbar secara tidak langsung berdampak pada semakin mudahnya caleg-caleg di Gerindra di Sumbar termasuk Kota Padang untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Keuntungan ini dimanfaatkan caleg-caleg Gerindra khususnya dengan menggunakan simbol-simbol ketokohan Prabowo dalam berbagai atribut promosi mereka pada masa kampanye.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta hasil temuan-temuan penelitian di lapangan yang telah peneliti himpun terkait dengan Pelebagaan Partai Gerindra sebagai

partai pemenang pada Pileg Tahun 2019 di Kota Padang, berikut adalah beberapa saran dari peneliti baik itu saran secara teoritik dan saran secara praktis:

6.2.1 Saran Teoritik

1. Kajian terkait dengan kemenangan Partai Politik pada dasarnya bisa dikaji dari berbagai perspektif, seperti dalam penelitian ini peneniti mencoba melihat kemenangan partai berdasarkan tingkat pelembagaan yang dimilikinya. Pelembagaan partai yang baik memang menjadi sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh semua parpol di era demokrasi sekarang ini, dengan tujuan menjaga eksistensi dan keberlangsungan partai dimasa depan, seperti halnya Partai Gerindra ini yang masih terkategori sebagai partai politik baru.
2. Setelah dijelaskan secara rinci dan ditarik kesimpulan bahwa kemenangan Partai Gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019 itu bukanlah dikarenakan pelembagaan partai yang sudah baik, akan tetapi peneliti melihat bahwa faktor popularitas Prabowo di Sumbar menjadi sebuah keuntungan bagi caleg Gerindra sehingga mereka lebih mudah dikenal masyarakat. Ditambah lagi data statistik yang menunjukkan bahwa bahkan pasca Pileg 2019 yakni di akhir Tahun 2020 Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra masih menjadi primadona masyarakat Sumbar. Sehingga saran peneliti untuk lanjutan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana dampak dari popularitas Prabowo di Sumbar ini terhadap elektabilitas caleg-caleg pendukungnya khususnya caleg Partai Gerindra termasuk Gerindra Kota Padang itu sendiri.
3. Maka untuk penelitian lanjutan perlu dikaji lebih dalam lagi sejauh mana pelembagaan ini mempengaruhi partai pada saat pemilhan, baik itu dari

tingkat elektabilitas calon maupun popularitas partai. Selain itu penelitian selanjutnya juga harus menggunakan perspektif berbeda dalam melihat kemenangan Partai Gerindra Kota Padang, sebab dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus menjelaskan pelebagaan partai berdasarkan empat indikator menurut Randall dan Svasand saja. Perpspektif yang bisa digunakan semisal dari segi *coattail effect* dengan meneliti masyarakatnya karena fenomena ini berlangsung pada saat Pemilu Serentak Tahun 2019, dari segi strategi politik seperti marketing, jaringan politik, dan perspektif lainnya yang ada dalam ranah kajian ilmu politik. Sehingga nantinya kajian ini akan lebih kaya akan bahasan yang beragam ketimbang hanya melihatnya dari satu perspektif pelebagaan saja. Topik bahasan dalam penelitian ini juga akan lebih mendalam apabila kita menggunakan metode yang berbeda misalnya metode kuantitatif, sebab data-data yang ada secara kuantitatif akan mampu menggambarkan hasil penelitian secara pasti. Masih banyak topik penelitian lanjutan yang bisa diteliti terkait dengan bahasan ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti baik itu dari segi kemampuan dan waktu, sehingga peneliti berharap ada peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian ini dan mengupgrade hasil yang telah peneliti dapatkan sebelumnya.

6.2.2 Saran Praktis

1. Saran untuk partai politik bahwasanya penting bagi sebuah partai untuk meningkatkan kualitas pelebagaan yang dimiliki, tujuannya adalah demi keberlangsungan dan eksistensi partai itu sendiri menghadapi persaingan yang semakin ketat dimasa mendatang. Partai politik akan mampu

menjadi organisasi yang demokratis apabila pelembagaan partai berhasil dicapai, sebab pelembagaan adalah aset jangka panjang yang wajib dimiliki partai politik agar tetap tertanam dalam kognisi masyarakat, sehingga partai mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama.

2. Kemudian partai politik sebaiknya berusaha untuk terbebas dari ketergantungan kepada seorang tokoh sentral dalam partai yang memegang kendali besar atas dinamika partai, sebaiknya selalu mempersiapkan regenerasi kader-kader serta bibit baru yang memiliki kualitas dan siap menggantikan tokoh-tokoh sentral tadi. Selain itu partai juga harus menghindari agar tidak menjadi *personalistic party*, sebab partai politik dengan tipe ini tidak akan mampu bertahan melewati persaingan politik di Indonesia, dikarenakan semakin banyaknya bermunculan partai-partai baru yang mungkin saja lebih berkompetensi dimasa depan. Sehingga partai sudah harus siap dengan berbagai kemungkinan “tergantikan” tersebut.

